



BANK SYARIAH MATAHARI
PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH



LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

PT BPR SYARIAH MATAHARI

TAHUN 2025



BAB I

PENJELASAN UMUM LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Matahari berkomitmen menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) secara konsisten dalam seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Penerapan tata kelola tersebut menjadi pedoman dalam mewujudkan pengelolaan bank yang sehat, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Syariah Matahari mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi BPR Syariah. Implementasi tata kelola dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, memperkuat pengendalian internal, menjaga kepercayaan pemegang saham, nasabah, dan pemangku kepentingan, serta mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang diterapkan meliputi:

1. Keterbukaan (*Transparency*)
PT BPRS Matahari menerapkan prinsip keterbukaan dalam penyampaian informasi yang material, akurat, dan tepat waktu kepada seluruh pemangku kepentingan. Laporan keuangan disusun sesuai standar akuntansi syariah dan didukung oleh pelaksanaan audit internal maupun audit eksternal.
2. Akuntabilitas (*Accountability*)
PT BPRS Matahari memiliki struktur organisasi, pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas sehingga setiap organ perusahaan dapat menjalankan fungsinya secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)
Dalam menjalankan kegiatan usaha, PT BPRS Matahari senantiasa mematuhi prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, serta seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan guna mendukung pengelolaan bank yang sehat dan berkelanjutan.
4. Profesional (*Professional*)
PT BPRS Matahari dikelola oleh sumber daya manusia yang kompeten, berintegritas, dan profesional. Setiap pegawai menjalankan tugas secara objektif, independen, serta menjunjung tinggi etika kerja dan nilai-nilai syariah.
5. Kewajaran (*Fairness*)
PT BPRS Matahari menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam memenuhi hak dan kewajiban seluruh pemangku kepentingan. Bank memberikan perlakuan yang setara kepada nasabah, pemegang saham, pegawai, dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Cakupan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas, dan Tanggung Jawab Direksi

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Muhammad Iman Sastra Mihajat, Ph.D.	Direktur Utama	- Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan operasional Bank sesuai prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku. - Menyusun dan menetapkan strategi serta kebijakan Bank untuk mencapai target perusahaan. - Memastikan penerapan Tata Kelola, manajemen risiko, kepatuhan, dan pengendalian intern berjalan secara efektif. - Mengawasi pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB) serta mengevaluasi pencapaian kinerja Bank. - Mewakili Bank dalam hubungan dengan regulator, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya.
2	Simni Herlina, M.Ak.	Direktur	- Menyusun dan melaksanakan strategi penghimpunan dana serta penyaluran pembiayaan. - Mengembangkan produk dan layanan Bank sesuai prinsip syariah dan kebutuhan nasabah. - Mengarahkan kegiatan pemasaran dan pengembangan jaringan bisnis Bank. - Memantau pencapaian target bisnis serta kualitas portofolio pembiayaan. - Berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk memastikan pertumbuhan bisnis yang sehat, berkelanjutan, dan sesuai prinsip kehati-hatian.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Komisaris
Dewan Komisaris merekomendasikan agar Direksi terus meningkatkan kualitas pembiayaan melalui pengendalian Non Performing Financing (NPF) serta mengoptimalkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) melalui strategi bisnis yang efektif guna mendukung pertumbuhan Bank.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah
Dewan Pengawas Syariah merekomendasikan agar melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kebijakan, prosedur, serta pelaksanaan kegiatan operasional Bank agar senantiasa sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku. Direksi juga memastikan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi DPS serta melakukan pemantauan secara berkala guna menjaga kepatuhan syariah dalam seluruh aktivitas Bank..

2. Pelaksanaan Tugas, dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum	Komisaris Utama	1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam pengelolaan Bank sesuai prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.
2	Dr. Jaenudin, S.Ag., M.Pd	Komisaris	2. Memberikan arahan, nasihat, dan rekomendasi kepada Direksi terkait kebijakan strategis serta pengembangan usaha Bank. 3. Memastikan penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap ketentuan OJK, dan prinsip syariah berjalan dengan baik. 4. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Direksi, pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB), serta tindak lanjut atas hasil pemeriksaan dan rekomendasi perbaikan. 5. Menyampaikan hasil pengawasan kepada pemegang saham serta memastikan Bank dikelola secara sehat, profesional, dan berkelanjutan.

Rekomendasi kepada Direksi	
Merekomendasikan kepada Direksi agar terus meningkatkan kinerja dan pertumbuhan usaha Bank dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian, memperkuat penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan, meningkatkan penerapan tata kelola, manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Direksi juga diharapkan terus melakukan pengembangan layanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta memastikan pencapaian target Rencana Bisnis Bank secara berkelanjutan.	

3. Pelaksanaan Tugas, dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Prof. Dr. Drs. Sopa, M.Ag	Ketua DPS	1. Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi agar kegiatan usaha Bank sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku. 2. Menilai dan memastikan kesesuaian produk, akad, kebijakan, serta kegiatan operasional Bank dengan prinsip syariah. 3. Melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, dan layanan Bank. 4. Memberikan opini dan rekomendasi terkait aspek kepatuhan syariah atas kegiatan usaha dan produk Bank. 5. Menyampaikan laporan hasil pengawasan serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada Direksi dan melaporkannya sesuai ketentuan regulator.
2	Muhib Rosyidi, S.Th.I., MA.Hum.	Anggota DPS	

Rekomendasi kepada Direksi	
Dewan Pengawas Syariah merekomendasikan Direksi agar terus memastikan seluruh kegiatan operasional, produk, dan kebijakan Bank berjalan sesuai dengan prinsip syariah, meningkatkan kepatuhan syariah, serta melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan terhadap penerapan akad dan proses bisnis Bank.	

4. Kepemilikan Saham Direksi, Dewan Komisaris, DPS dan Pemegang Saham pada kelompok usaha BPRS

No	Nama Anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS dan Pemegang Saham	Kepemilikan Saham	
		Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
	NIHIL		

5. Kepemilikan Saham Direksi, Dewan Komisaris, DPS dan Pemegang Saham pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS dan Pemegang Saham	Kepemilikan Saham	
		Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
	NIHIL		

6. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris, Anggota DPS dan/atau Pemegang Saham BPRS yang Bersangkutan

- a. Hubungan Keuangan Anggota Direksi

No	Nama Direksi	Kepemilikan Saham			
		Anggota Direksi Lain	Anggota DPS	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

- b. Hubungan Keluarga Anggota Direksi

No	Nama Direksi	Kepemilikan Saham			
		Anggota Direksi Lain	Anggota DPS	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

7. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota DPS dan/atau Pemegang Saham BPRS yang bersangkutan

- a. Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Komisaris	Kepemilikan Saham			
		Anggota Direksi Lain	Anggota DPS	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

b. Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Komisaris	Kepemilikan Saham			
		Anggota Direksi Lain	Anggota DPS	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

8. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota DPS dan/atau Pemegang Saham BPRS yang bersangkutan

a. Hubungan Keuangan Dengan Anggota DPS

No	Nama DPS	Kepemilikan Saham			
		Anggota Direksi Lain	Anggota DPS	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

b. Hubungan Keluarga Dengan Anggota DPS

No	Nama DPS	Kepemilikan Saham			
		Anggota Direksi Lain	Anggota DPS	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

9. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota DPS dan/atau Pemegang Saham BPRS yang bersangkutan

a. Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham BPRS

No	Nama Pemegang Saham	Kepemilikan Saham			
		Anggota Direksi Lain	Anggota DPS	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

b. Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham BPRS

No	Nama Pemegang Saham	Kepemilikan Saham			
		Anggota Direksi Lain	Anggota DPS	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

10. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris pada BPR, BPRS lain, dan/atau Lembaga atau Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Lembaga Lain	Jabatan
	NIHIL		

11. Rangkap Jabatan Anggota DPS sebagai Anggota DPS pada Lembaga Keuangan Syariah Lain

No	Nama Anggota DPS	Nama Lembaga Lain	Jabatan
1	Prof. Dr. Sopa, M.Ag	PT Amarthha Mikro Fintek (Amartha)	Anggota DPS

12. Paket atau Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS

No	Jenis Remunerasi (Dalam Setahun)	Direksi		Dewan Komisaris		DPS	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
A	Remunerasi						
1	Gaji Pokok	2	460.650.000	2	76.310.500	2	41.458.500
2	Tunjangan	2	130.934.990	2	0	2	0
3	Tantiem	2	0	2	0	2	0
4	Bonus	2	0	2	0	2	0
5	Kompensasi Berbasis Saham	2	0	2	0	2	0
6	Remunerasi Lainnya	2	0	2	0	2	0
	Total Remunerasi		591.584.990		76.310.500		41.458.500
B	Fasilitas Lain						
1	Transportasi	2	37.402.000 (1 unit mobil dinas per direksi)	2	0	2	0
2	Kesehatan	2	5.299.778 (Claim kesehatan direksi dan keluarga)	2	0	2	0
3	Fasilitas Lin-Lainnya	2	45.648.190 (Smartphone)	2	0	2	0
	Total Fasilitas Lainnya		88.349.968				
C	Total						
	Remunerasi dan Fasilitas Lain	2	679.934.958	2	0	2	0

13. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

No	Jenis Fasilitas	Rasio
1	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang terendah	1.18
2	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah	1.43
3	Rasio gaji anggota DPS yang tertinggi terhadap gaji anggota DPS yang terendah	1.25
4	Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji pegawai yang terendah	1.71
5	Rasio gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	0.22
6	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi terhadap gaji pegawai yang tertinggi	4.61

14. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

1. Penyelenggaraan Rapat dalam 1 (satu) tahun (Juli s.d Desember 2025)

No	Tanggal	Jumlah Peserta	Agenda
1	15 Agustus 2025	4	Pembahasan laporan keuangan Juli 2025 dan evaluasi manajemen risiko Semester I 2025. Dewan Komisaris mengevaluasi kondisi keuangan, tingkat kesehatan bank, serta profil risiko sebagai dasar perbaikan kinerja ke depan.
2	17 September 2025	4	Pembahasan laporan keuangan Agustus 2025, evaluasi rasio keuangan, serta arahan kepada Direksi untuk meningkatkan profitabilitas, menjaga kualitas pembiayaan, dan menyusun rencana aksi perbaikan kinerja.
3	27 Oktober 2025	4	Evaluasi penyelesaian seluruh komitmen dan dokumen yang menjadi target penyampaian sampai 31 Oktober 2025. Seluruh tindak lanjut dinyatakan telah diselesaikan sesuai ketentuan dan tepat waktu.
4	11 November 2025	4	Pembahasan laporan keuangan Oktober 2025, evaluasi kesehatan bank,

No	Tanggal	Jumlah Peserta	Agenda
			progres penambahan modal inti, penyusunan RBB 2026, serta pembahasan penyederhanaan mekanisme pembiayaan bagi Amal Usaha Muhammadiyah (AUM).

2. Kehadiran Dewan Komisaris

No	Nama Dewan Komisaris	Jumlah Peserta		Tingkat Kehadiran
		Fisik	Telekonferensi	
1	Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum	3	1	100 %
2	Dr. Jaenudin, S.Ag., M.Pd	3	1	100 %

15. Frekuensi Rapat DPS

1. Penyelenggaraan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

No	Tanggal	Jumlah Peserta	Agenda
1	23 Juli 2025	2	Pembahasan dan persetujuan SOP serta akad produk pembiayaan syariah, termasuk pembiayaan multiguna, multijasa, dan akad musyarakah mutanaqisah.
2	22 Agustus 2025	2	Pembahasan penerapan prinsip syariah pada produk dan operasional bank serta evaluasi ketentuan pembiayaan.
3	2 September 2025	2	Evaluasi hasil pembahasan sebelumnya dan penyempurnaan ketentuan produk serta mekanisme pembiayaan sesuai prinsip syariah.
4	23 Oktober 2025	2	Evaluasi pelaksanaan pembiayaan syariah dan pembahasan penyempurnaan kebijakan operasional agar sesuai dengan fatwa dan ketentuan yang berlaku.
5	26 November 2025	2	Pembahasan mekanisme Top Up Internal dan Take Over/Top Up Eksternal,

No	Tanggal	Jumlah Peserta	Agenda
			dengan penekanan pada kejelasan akad, pemisahan akad lama dan baru, serta mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 89 tentang Refinancing Syariah.

2. Kehadiran DPS

No	Nama DPS	Jumlah Peserta		Tingkat Kehadiran
		Fisik	Telekonferensi	
1	Prof. Dr. Sopa, M.Ag	5	-	100 %
2	Muhib Rosyidi, S.Th.I., MA.Hum	5	-	100 %

16. Jumlah Penyimpangan Intern (Intern Fraud)

Penyimpangan Intern (Intern Fraud) dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang dilakukan			
	Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap
	Tahun Laporan	Tahun Laporan	Tahun Laporan	Tahun Laporan
Total Fraud	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-
Dalam Proses Penyelesaian Internal BPRS	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaian	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti melalui Proses Hukum	-	-	-	-

17. Jumlah permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian BPRS

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah mempunyai kekuatan Hukum tetap	-	-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-
Total	-	-

18. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Ket
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

19. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial

Tanggal Penyaluran Dana	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima	Jumlah
13 Januari 2026	Penyaluran dana untuk mendukung pembangunan, renovasi, dan pemeliharaan sarana ibadah Masjid di lingkungan PCM Setiabudi.	PCM Setiabudi	Rp 5.006.500
20 Januari 2026	Bantuan dana untuk mendukung pembangunan dan penyediaan fasilitas Masjid di lingkungan SMP Taruna Sains Muhammadiyah.	SMP Taruna Sains Muhammadiyah	Rp 5.000.000
28 Januari 2026	Pemberian bantuan beasiswa guna mendukung keberlangsungan pendidikan mahasiswa yang membutuhkan.	Mahasiswa Univ Muhammadiyah Bone	Rp 17.502.500
05 Februari 2026	Penyaluran bantuan berupa paket sembako kepada masyarakat dhuafa melalui program sosial Lazismu.	Masyarakat Dhuafa	Rp 2.000.000
20 Februari 2026	Penyaluran dana zakat untuk mendukung program sosial dan pemberdayaan masyarakat yang dikelola PCM Tanah Abang.	PCM Tanah Abang	Rp 1.502.500
03 Maret 2026	Pemberian santunan kepada anak yatim dalam rangka mendukung kesejahteraan dan kebutuhan pendidikan.	Anak Yatim melalui UHAMKA	Rp 2.100.000
06 Maret 2026	Penyaluran bantuan sosial kepada kaum dhuafa melalui program yang	Masyarakat Dhuafa	Rp 1.200.000

Tanggal Penyaluran Dana	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima	Jumlah
	diselenggarakan Aisyiyah Ranting Ciputat.		
09 Maret 2026	Dukungan pelaksanaan bazar murah sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.	Masyarakat Penerima Manfaat program HIMBARSI	Rp 1.000.000
09 Maret 2026	Dukungan penyelenggaraan kegiatan buka puasa bersama bagi penyandang disabilitas sebagai bentuk kepedulian sosial.	Penyandang Disabilitas melalui PP Muhammadiyah	Rp 1.500.000
09 Maret 2026	Penyaluran santunan kepada anak yatim dan masyarakat dhuafa melalui PCM Senen	PCM Senen	Rp 1.500.000
12 Maret 2026	Bantuan dana untuk mendukung pengembangan sarana, prasarana, dan peningkatan kualitas pendidikan di Sekolah Ruhama.	Sekolah Ruhama	Rp 100.000.000
12 Maret 2026	Penyaluran dana untuk mendukung pengembangan fasilitas pendidikan dan asrama Saintek Boarding.	Saintek Boarding	Rp 50.000.000
12 Maret 2026	Bantuan dana untuk mendukung peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di SMK Muhammadiyah Cariu.	SMK Muh Cariu	Rp 50.000.000
12 Maret 2026	Penyaluran dana guna mendukung pelaksanaan kegiatan sosial produktif yang memberikan manfaat bagi masyarakat.	Kegiatan Produktif Sosial LPPOM MUI	Rp 1.500.000
TOTAL			Rp 265.811.500

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

Dengan ini memberikan persetujuan atas Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2025 untuk dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Tangerang, 30 Juli 2026
PT BPR Syariah atahari



Muhammad Iman Sastra Mihajat, Ph.D
Direktur Utama

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a loop and a vertical stroke.

Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum
Komisaris Utama